

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul Wahid dan Moh.Muhibbin, 2009, *Etika Profesi Hukum, Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.

Abdul Manan. 2010, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Aminudin, *Tujuan, Strategi dan Model dalam Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Lembaga Penelitian UNISMA Malang

Amzulian Rifai dkk, 2007, “Wajah Hakim dalam Putusan”, Pusham-UII, NCHR dan Komisi Yudisial

Budiman B. Sagala, 1982, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Gahlia Indonesia, Jakarta

Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi., S.H., M.Hum,2013, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Setara Press, Malang.

Dr. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., M.M, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Djamali Abdoei, 1993 , *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta

Domi C. Matutina dkk.. 1993, *Manajemen Personalia* Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta

D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M.Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*

Eddy OS. Hiariej. 2013, *Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Dalam Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional , Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.

Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama

Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo

Hamzah B.Uno dan Nina Lamatenggo, 2012, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, PT Bumi Aksara. Jakarta

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Edisi keenam, Minnesota

Hidayat, S, 1985, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara Jakarta

H. Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jhon Salindeho, 1998, *Tata Laksana dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta
- J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indeph Publishing, Bandar Lampung: 2013
- K. Bertens, 2005, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Bandung
- M. Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Ketiga*, Pusat pelayananan Keadilan, dan Pengabdian Hukum d/n Lembaga Kriminologi UI, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro. 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*. Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta
- Miftah Thoha, 1999, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana Press, Jakarta
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta
- Moh. Koesnoe, *Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945*, Varia Peradilan tahun XI, No. 129 Juni 1996
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung

- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung
- M. manullang, 1995, *Dasar-dasar manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Neuman, William Lawrence. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and quantitative Approaches*. Pearson Education
- Oemar Seno Adji, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta
- Paul B Horton, 1984, Chester L Hunt, Terjemah: Aminuddin Ram, Tita Sobari, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga
- Peter de Cruz , 1999, *Comparative Law in a Changing World, Second Edition*, Cavendish Publishing Limited, Sidney, Australia
- Prasetya Irawan, 1999, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, STAIN, Jakarta
- Prasojo. Eko, 2009, *Reformasi Kedua : Melanjutkan edtafet Reformasi*, Jakarta : Salemba Humanika
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakrta
- Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, , 2006, *Etika Profesi Hukum* , PT. Aditya Bakti, Bandung
- Robert B. Seiman, 1972, *Law and Development: A General Model Law and Society Review*, Jilid VII, February.

- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia, Jakarta
- R. Tresna, 1978, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rewansyah, Asnawi, 2010, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, Yusaintanas Prima, Jakarta.
- Rusminah, 1985, “Kekuasaan Kehakiman”, dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa Ini, “sebuah Bunga Rampai”*, : Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. I
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Adminitrasi Negara*, Glora Mandani Press, Medan
- Santosa, Pandji, 2008, *Adminstrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Gaovernance*, Refika Aditama, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Sebuah Sistem Hukum Indonesia, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo. 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, cet. 2

- Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, 1990, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito, Bandung
- Sukardi, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta
- Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, Jakarta
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2003, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta
- Solahuddin, 2010, *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Sudjana. , 2004, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Falah Production, Bandung
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Sulistiyowati Irianto, dkk. 2017. *problematika hakim dalam ranah hukum, pengadilan, dan masyarakat di indonesia: studi sosio-legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1982, *Apakah The Rule of Law Itu?*, Alumni, Bandung
- Suryono Sutarto, 1990, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang
- Sulaiman Rasyid “Piqih Islam “. Attahiriyah, Jakarta, 1976

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta

Wildan Suyuthi, 2004, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, Pusdiklat MA-RI: Jakarta

KAMUS

_____, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. 4

PERATURAN :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

UU RI Nomer 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomer 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomer 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle blowing*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

Instruksi Presiden Nomer 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomer KMA/012/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomer KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 Tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Surat Keputusan KMA Nomer I.114/KMA/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan oleh Mahkamah Agung RI 2008

Tata Laksana Pengawasan Peradilan Buku IV Edisi 2007 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 2008

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I Mahkamah Agung RI, Agustus 1993

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan Peradilan Tahun 2016 Jo Perma Nomor 1 Tahun 2016

Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : W12-U/1020/KP.07.1/6/2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomer KMA/080/SK/VII/2000 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi) Tentang

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomer 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung RI No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomer 5 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dari Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomer MA/SEK/02/SK/2012 tanggal 2 Januari 2012. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia

Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Nomer 36 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan

Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomer W12 U/1020/KP.07.01/6/2020 tanggal 24 Juli 2020 untuk melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banyumas.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/IV /2007 tentang Memberlakukan BUKU IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

Buku V Mahkamah Agung RI Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan

SK KMA No. 153/KMA/SK/XI/2009 tentang Penunjukan Pengadilan sebagai percontohan penanganan pengaduan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di Bawahnya

Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017/ tanggal 11 September 2017 tentang Pengawasan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi

LEMBARAN NEGARA

Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1970

JURNAL/REDAKSI/PANDUAN/MAJALAH:

Krisna Harahap, 2010 “Paradigma Baru Konsep Hakim Transformatif : Perspektif Agenda Reformasi Peradilan”. *Buletin Komisi Yudisial*. Volume V Nomor 2.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2007, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta.

Redaksi Citra Umbara, 2003, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*, : Citra Umbara, Bandung

Ridwan. “ Hukum di Pengadilan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Bermartabat”. Dalam *Varia Peradilan*. Tahun XXII No.272

Goenawan Wanaradja, “ Hukum, Hakim, dan Keadilan “, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum IKAHI, Tahun XII No. 142, Juli 1997, Jakarta

LAPORAN DAN RENSTRA:

Laporan Hasil Pengawasan Pengadilan Negeri Banjarnegara Tahun 2020

Laporan Tindaklanjut Hasil Pengawasan oleh hakim tinggi Pengawas Daerah PT Jawa Tengah, di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas II Tahun 2020

Laporan Hasil pengawasan daerah Oleh hakim pengawas Pengadilan tinggi Jawa Tengah Tahun 2020 Pengadilan negeri Banyumas kelas II

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Daerah Oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2020 Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II

Renstra Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2015 – 2019

WAWANCARA:

Wawancara Online dengan Hakim Ad Hoc Tipikor Timbul Priyadi, S.H., M.H, bulan September 2020

INTERNET:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579ad87c2ced4/cegah-penyimpangan--materbitkan-perma-pengawasan-aparatur-peradilan/> DI Akses Pada Tgl. 18 Juli 2019

<http://pt-semarang.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Di akases pada tanggal 16 September 2020

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2019/12/24/ada-peningkatan-perkara-di-jawa-tengah/> Copyright © Radar Semarang Digital. Di akses pada Tgl 14 Juli 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204182120-12-351116/kpk-bupati-jepera-diduga-suap-hakim-pn-semarang>, Di akses Pada Tgl. 18 Juli 2019

<http://www.pasmitra.com/2015/08/kebenaran-keadilan-bermartabat.html>, di akses 13 juli 2019

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3648/peluncuran-sistem-informasi-perengkapan-mahkamah-agung-republik-indonesia-sipermari>, Di akses pad tanggal 19 September 2020

<http://pt-semarang.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kegiatan-pengadilan/1962-rapat-pembinaan-dan-pengawasan-hakim-tinggi-hakim-ad-hoc-dan-hakim-yustisial-pada-pengadilan-tinggi-jawa-tengah>, Di akses pada tanggal 19 September 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, Di akses pada tanggal 24 September 2020

<http://proseapengawasan.blogspot.com/di> akses pada tanggal 12 Oktober 2020

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kode-etik-dan-tujuannya/> di akses pada tanggal 12 Oktober 2020

Serafica Gischa, Editor: Nibras Nada Nailufar,
<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/29/200000469/sistem-hukum-anglo-saxon-perbedaannya-dengan-sistem-eropa-kontinental?page=all>. Di akses pada tanggal 12 Oktober 2020

Sudikno Mertokusumo, Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga Kehakiman, <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-daristruktur.html> di akses pada Tanggal 16 Oktober 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55a26de809417/irah-irah--kepala-putusan-yang-bermakna-sumpah/>, Di akses pada Tanggal 12 Oktober 2020